

TAJUK RENCANA

Mendorong Perluasan Vaksinasi di DIY

PATUT disyukuri angka kasus Covid-19 di DIY terus menurun, namun angka kematiannya masih tergolong tinggi. Kita harapkan dengan penurunan kasus Covid-19 di DIY tidak membuat kita lengah, melainkan justru menambah semangat untuk lebih berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Fenomena penurunan kasus Covid-19, juga terjadi di level nasional yang angka kasus harian sudah di bawah 10 ribu. Tentu ini perkembangan yang menggembirakan dan harus disikapi secara hati-hati. Sebab, di sejumlah daerah, kasus bisa melonjak lagi karena masyarakatnya euforia dengan melonggarkan prokes. Jangan sampai kerja keras kita sia-sia hanya karena tidak sabar menahan diri sehingga melonggarkan prokes.

Kita mendukung sepenuhnya Pemerintah DIY yang terus menggenapkan vaksinasi guna mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Gencarnya vaksinasi juga harus dibarengi dengan perluasan tracing serta skrining untuk mencegah penyebaran Covid-19. Berkaitan itu Pemda DIY telah menyiapkan strategi perluasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Selain diterapkan menjadi syarat wajib bepergian maupun berkunjung ke tempat-tempat umum dan mal, juga akan diperluas penerapannya di objek wisata, restoran, sekolah, warung makan, bahkan angkringan (KR 6/9).

Hemat kita, ini strategi yang sangat bagus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Aplikasi ini sekaligus menjadi alat skrining untuk memastikan masyarakat yang bepergian sudah divaksin atau belum, sehingga dapat diambil langkah antisipatif. Berkaitan itu, kita

mendorong pemerintah pusat segera mengirim QR code aplikasi PeduliLindungi yang nantinya akan disebar ke tempat-tempat umum.

Berkaitan strategi tersebut, kita perlu mengingatkan kepada Pemda DIY paling tidak untuk dua hal. Pertama, tidak semua warga akrab dengan aplikasi di HP, sehingga sosialisasi tetap harus digencarkan, termasuk menyangkut teknis pengoperasian aplikasi PeduliLindungi. Kedua, bagaimana dengan mereka yang selama ini tidak punya atau pegang HP, tentu juga harus dipikirkan. Harus ada mekanisme untuk mengatur hal-hal seperti itu, agar upaya mencegah penyebaran Covid-19 benar-benar efektif.

Di samping itu, meski kecenderungan kasus Covid-19 di DIY menurun, namun aturan prokes tak boleh dikendurkan agar kerja keras kita selama ini tidak sia-sia. Langkah DIY untuk tidak tergesa-gesa mengelar pembelajaran tatap muka (PTM) patut kita apresiasi, karena ini menunjukkan kehati-hatian dalam bertindak.

Kita juga mengharapkan aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP untuk lebih tegas menyikapi pelanggaran prokes di masyarakat. Sebab, berdasar pemantauan koran ini, masih ada sebagian warga yang mulai melepas masker karena menganggap situasi sudah aman dan terkendali. Pengawasan terhadap pedagang kaki lima juga tak boleh kendur, karena acap mereka mengabaikan prokes dengan tidak memakai masker, atau memakai masker namun tidak benar. Hal-hal yang kelihatan sepele ini tak boleh diabaikan, karena kasus Covid-19 menjadi besar lantaran banyak yang menyepelekan. □

Di Balik Pembubaran BSNP

Bramastia

esmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan; pelaksanaan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan menteri.

Penghapusan BSNP diperkuat dalih Kementerian Pendayagunaan Aparatur



KR-JOKO SANTOSO

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) akhirnya membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang langsung ditandatangani Nadiem Makarim pada 24 Agustus 2021. Selama ini, posisi dari BSNP sebagai badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Keberadaan BSNP selama ini lebih berstatus sebagai lembaga independen dalam mengembangkan dunia pendidikan nasional.

Dasar hukum pembubaran BSNP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021 di pasal 334 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Dalih Kekuasaan

Posisi BSNP selanjutnya diganti dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mendikbudristek. Dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, terutama Pasal 234 bahwa Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

Begitu juga pasal 235 saat melaksanakan tugas sebagaimana pasal 234 bahwa Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan di bidang standar pendidikan : penyusunan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan as-

Negara dan Reformasi Birokrasi yang merekomendasikan agar struktur organisasi yang baik harus bersifat adaptif dengan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan bentuk sentralisme kebijakan pendidikan. Padahal ada nilai pendidikan yang memiliki makna lebih dan tidak terpaksa sistem birokrasi prosedural yang jauh dari kemerdekaan berpikir.

Lebih memprihatinkan saat dalih kekuasaan atas penghapusan BSNP sebagai langkah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) merupakan bagian tugas dan fungsi kementerian dan SNP sebagai bagian NSPK yang rumusannya menjadi tugas dan

fungsi Kemendikbudristek. Lantas dimanakah letak Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka?

Sentralisasi Pendidikan

Kalau mau jujur, terbitnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek, terutama pasal 29 menyebutkan secara jelas bahwa Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan bertugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Artinya, bahwa agenda pembubaran BSNP dari Kemendikbudristek memang sudah diniatkan sejak lama dan didesign secara tersistem.

Dalih keinginan mengakomodasi keterlibatan publik dalam perumusan SNP melalui pembentukan Dewan Pakar SNP sebatas membungkam suara kritis pendidikan. Begitu pula dalih Kemendikbudristek yang akan memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait SNP hanya sebatas mencari legalitas formal.

Keberadaan Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan ibarat macan ompong karena tugasnya hanya memberikan pertimbangan kepada Mendikbudristek mengenai SNP, bukan membangun kebijakan standar nasional pendidikan. Adalah wajar apabila suara kritis pendidikan khawatir karena kebijakan pendidikan kini tersentral kepada Mendikbud-Ristek. Kekuasaan Mendikbud-Ristek kini sangat besar, lebih otoriter dan mudah disetir 'agen asing'. Agar kuasanya tidak lagi menata dunia pendidikan, tetapi meliberalkan pendidikan nasional.

*) **Dr Bramastia MPd**, pemerhati kebijakan pendidikan, Dosen Pendidikan Sains Pascasarjana FKIP UNS (Surakarta)

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Merindukan Pembelajaran Tatap Muka

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) kini sangat dirindukan, tidak hanya oleh peserta didik namun juga guru. Bagi siswa mungkin kebosanan sudah amat terasa. Sebagai insan sosial tentu mereka merindukan interaksi dengan teman-teman sekolah dan guru. Apalagi yang baru naik ke jenjang di atasnya, mereka pasti ingin segera merasakan sekolah barunya.

Tugas-tugas daring selama ini juga menimbulkan rasa bosan karena harus dikerjakan sendiri. Lain halnya kalau di sekolah, mereka bisa minta bantuan teman sekelas atau bahkan kepada gurunya yang mungkin lebih menguasai materi.

Para guru tentunya juga mengharapkan pandemi segera berakhir sehingga bisa segera bertemu dengan murid-muridnya. Guru yang sudah terbiasa berinteraksi dengan siswa tentu akan senantiasa merindukannya.

Pembelajaran daring, apabila dapat dikemas dengan baik oleh guru dengan menggunakan teknologi yang sesuai karakter siswa, mungkin akan bisa berhasil mentransfer ilmu kepada siswa, dalam hal ini tugas guru sebagai pengajar bisa terlaksana. Meskipun begitu tatap muka juga akan lebih baik, karena siswa bisa bertanya langsung kepada gurunya kalau ada

hal-hal yang belum jelas tentang materi.

Interaksi sosial antarteman dan guru akan terjadi. Masalah juga terjadi dalam pembelajaran praktik. Pembelajaran praktik hanya bisa dilakukan pada pembelajaran tatap muka di sekolah, karena peralatannya hanya ada di sekolah. Selain mengajar tugas guru juga mendidik. Dalam hal mendidik tentunya akan lebih efektif bila dilakukan ketika interaksi langsung dengan anak. Guru dapat langsung menegur atau menasihatinnya ketika ia berbuat salah.

Dalam situasi seperti sekarang ini peran orangtua sangatlah penting dalam mendidik anak, karena hanya orangtua yang paling sering berinteraksi langsung dengan mereka.

Untuk saat ini pembelajaran tatap muka masih harus menunggu waktu yang belum menentu. Menurut Presiden Joko Widodo, sekolah boleh memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) luring ketika seluruh siswanya tervaksin. Target penuntasan vaksin pelajar di DIY, menurut Sekda DIY Baskoro Aji adalah bulan November atau akhir Oktober 2021. Jadi bagaimanapun para siswa dan guru masih harus sabar menanti. □

*) **Triyanta SPd**, Guru Bahasa Inggris dan Kepala Perpustakaan SMK Negeri Girimulyo Kulonprogo.

Aksara dan Kebermaknaannya

Triningsih

INDONESIA harus memberantas buta aksara. Permasalahan buta aksara masih diderita jutaan orang di dunia. Hal tersebut bukan permasalahan yang sempit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa buta aksara yaitu ketidakmampuan individu atau warga dalam hal membaca atau menulis huruf maupun kata-kata.

Sejatinya orang yang buta aksara adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan kehidupan. Kemampuan membaca menulis yang benar bukan merupakan kemampuan mekanis. Namun berhubungan dengan kemampuan intelektual yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai dan sikap, mengembangkan keterampilan serta perilaku.

Diharapkan dari kegiatan membaca bukan sekedar kegiatan verbalistik belaka. Dimana kegiatan membaca tanpa memahami makna yang terkandung didalamnya. Karena membaca verbalistik tersebut tidak memiliki dampak bagi perubahan atau pengembangan pemikiran, sikap, nilai-nilai dan perilaku.

Bukan Terpisah

Membaca suatu kata-kata (buku teks) sebenarnya bukan terpisah dari pemahaman tentang realita kehidupan. Sebab kata-kata yang ditulis manusia bukan kata-kata yang kosong, yang terlepas dari permasalahan, pemikiran, cita-cita, atau harapan yang berkembang dalam pikirannya. Kata-kata (*words*) adalah merupakan simbol-simbol pemahaman dan pemikiran manusia tentang realita (dunia) yang ada disekitar dan kata-kata juga merupakan cerminan keinginan untuk melakukan tindakan. (Sodiq A Kuntoro, 2007:23).

Umat manusia perlu berterimakasih kepada nenek moyang kita dahulu. Bahwa

Bangsa Sumeria menemukan huruf pertama kali dengan medium lempengan tanah liat, pada tahun 4.000 SM. Kemudian Pi Sheng (China) melakukan pencetakan buku pertama kali setelah beliau menemukan mesin cetak sederhana pada tahun 1041. Perkembangan pesat terjadi karena Johannes Guttenberg (1456) menggunakan mesin cetak metal sehingga lahir barang cetakan. Adanya mesin cetak tersebut telah memungkinkan produksi massal bahan bacaan sehingga melahirkan kebutuhan kemampuan membaca dan menulis.

Adanya perkembangan ilmu teknologi komunikasi dan informasi menjadikan permasalahan baru. Kehidupan umat manusia di dunia akan tergantung pada ilmu tersebut. Banyak contoh kegiatan masyarakat yang tadinya dilakukan secara manual, kini bisa dibantu oleh mesin. Sebut saja yang dulu mengambil uang di teller pada jam kerja kantor, kini bisa sewaktu-waktu mengambil melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Disisi lain, ada media massa yang juga tumbuh pesat. Kita bisa cek stasiun televisi yang mengudara di Indonesia ada banyak sekali. Belum lagi radio yang sudah menembus ke pelosok desa. Apalagi sekarang sosial media tidak kalah meriahnya. Ada WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube dan lain sebagainya. Jika masyarakat menelan mentah-mentah semua aksara dan informasi yang berlalu lalang tersebut tanpa adanya kontrol, bisa dibayangkan apa jadinya generasi ini.

Perubahan Kehidupan

Kembali ke awal pembahasan, bahwa kemampuan membaca aksara bukan sekedar membaca secara verbalistik. Melainkan harus memahaminya, sehingga tercipta perubahan kehidupan yang baik. Seperti pernah dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 Prof Dr Din Syamsuddin : *Makna yang didapat lewat membaca dapat dijadikan feudah bagi manusia untuk berbuat baik, dan memberikan 'cahaya' jalan kebaikan kepada orang lain.*

Di Hari Aksara Sedunia (*International Literacy Day*) 8 September ini, marilah kita menjadi pribadi yang cerdas dalam memahami aksara. Kita telah baik-baik aksara tersebut, sehingga tercipta makna yang mendalam agar makna tersebut memberikan kebaikan kepada orang lain. Selamat Hari Aksara Sedunia...

*) **Triningsih SIP**, Pustakawan Muda IAIN Surakarta)

Pojok KR

Prioritaskan penyelamatan UMKM guna pulihkan ekonomi DIY.
-- **Jangan lupa pekerjanya juga harus diselamatkan.**

Mendagri ingatkan Pemda perbaiki input data Covid-19.
-- **Data di pusat juga perlu dirapikan jangan sampai kebocoran.**

DIY perluas penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
-- **Mereka yang tak punya HP mungkin perlu disubsidi.**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkr@yahoo.com, iklandkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.